

Pengiriman Surat Suara Pilkada ke Kaltim Dikawal Ketat



KR-Istimewa

Petugas merakit kotak suara.

KPU Temanggung Rakit Kotak Suara

TEMANGGUNG (KR) - KPU Kabupaten Temanggung rakit 2.612 kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur - Wakil Gubernur Jateng dan Bupati - Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Temanggung Henry Sofyan Rais mengatakan sortir dan perakitan kotak suara dilakukan dalam tiga hari dengan melibatkan 10 tenaga. "Kotak suara selesai dirakit dalam 3 hari, perakitan di gudang KPU di stadion tenis indoor," kata Henry, Senin (21/10).

Henry mengatakan perakitan dan sortir kotak suara telah dilaksanakan selama 3 hari, Kamis - Sabtu, 17-19 Oktober 2024. Pada perakitan itu dalam pengawasan petugas Kepolisian Resort Temanggung. Henry mengatakan KPU Kabupaten Temanggung sebelumnya menerima 2.652 kotak suara, yang kemudian di simpan di gudang logistik tenis indoor milik Pemkab setempat.

Kotak tersebut, akan didistribusikan pada 1306 TPS yang tersebar di 21 kecamatan masing-masing TPS terdapat 2 buah kotak suara. Sedangkan sisa dari kotak suara belum dirakit.

Henry menyampaikan logistik lain yang sudah tiba di KPU Temanggung antara lain tinta, kabel ties, bilik suara, dan sebagian sampul. Disampaikan surat suara berdasarkan keterangan dari KPU Jateng akan tiba pada 25 Oktober 2024, yang lantas dilakukan sortir dan pelipatan. (Osy)-d

Secepatnya Dibangun Pasar Darurat



KR-Sukmawan

Pedagang Pasar Wonokriyo mencari barang yang mungkin masih bisa diselamatkan di kiosnya.

KEBUMEN (KR) - Pemkab Kebumen akan secepatnya membangun pasar darurat untuk pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Wonokriyo Gombang. Pasar darurat akan memanfaatkan lahan pasar blok timur, dan di terminal nonbus yang ada di kompleks Pasar Wonokriyo.

"Ada 672 pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Wonokriyo. Agar mereka bisa kembali berdagang, dan perekonomian kembali bergerak, secepatnya dibuat pasar darurat," jelas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, Sabtu (19/10).

Menurutnya, Pasar Wonokriyo Gombang hingga kini masih dikelola swasta yakni PT Karsa Bayu. Pengelolaan Pasar Wonokriyo Gombang oleh PT Karsa Bayu akan selesai pada akhir tahun 2025. Karena itu dalam penanganan pascakebakaran, Haryono intens berkomunikasi dengan pihak PT Karsa Bayu. "Sebagai pengelola, tentu punya tanggung jawab bersama," ujar Haryono.

Terkait penyebab kebakaran, Haryono tidak mau menduga-duga karena penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. (Suk)-d



KR-Sukmawan

DIKERUBUTI: Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024-2029, Minggu (20/10), mengingatkan warga Kebumen ketika Prabowo mengikuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Petanahan pada 9 Maret 2023. Tampak Prabowo yang waktu itu menjabat Menteri Pertahanan, dikerubuti ibu-ibu untuk minta foto bersama.

SEMARANG (KR) - Aparat kepolisian diterjunkan untuk pengamanan distribusi surat suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Provinsi Kalimantan Timur. Pengiriman surat suara dengan pengawasan ketat dari PT Temprina Media Grafika, Bawen, Kabupaten Semarang.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto. Ia menyebutkan pengawasan pengiriman sebanyak 5.811.592 lembar surat suara dari Jawa Tengah ke Kaltim guna memastikan kelancaran dan keamanan proses pengiriman ini. Pengiriman surat suara dilakukan dengan menggunakan armada Truk Tronton Box Container yang diangkut melalui jalur darat

menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kemudian dilanjutkan melalui jalur laut menuju Provinsi Kalimantan Timur.

Pengawasan distribusi ini dilakukan personel Brimob Polda Kalimantan Timur serta anggota pengamanan KPU Provinsi Kalimantan Timur. Satu unit mobil pengawal berisi personel Brimob dan anggota pengamanan KPU turut mendampingi armada pengangkut selama perjalanan untuk memastikan keamanan surat suara hingga tiba di tujuan. "Pengamanan pengiriman surat suara Pilgub dan Pilbup Provinsi Kalimantan Timur dari Bawen Kabupaten Semarang sudah menjadi tanggung jawab Polri", jelasnya. Disebutkan tugas Polri dalam pengawasan surat suara merupakan bagian

penting dari tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi.

Ia menegaskan Polri memiliki peran vital dalam mengamankan tahapan Pilkada, termasuk pengawasan distribusi surat suara, kami memastikan bahwa setiap tahapan berjalan aman, mulai dari pengiriman, hingga penyimpanan. Pengawasan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga hak demokratis masyarakat agar Pilkada berlangsung tanpa gangguan. Menurut Kabid Humas pengamanan ini dilakukan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada, seperti sabotase atau gangguan keamanan lainnya.

"Kami tidak hanya mengawal surat suara secara



KR-Istimewa

Petugas kepolisian bersenjata laras panjang mengawal kotak suara yang akan dikirim ke Kaltim.

fisik, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berlangsung tanpa hambatan. Tugas ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, diharapkan seluruh tahapan Pilkada, termasuk pengiriman surat suara ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. (Cry)-d

Pemprov Jateng Akan Pungut Pajak Alat Berat

SEMARANG (KR) - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Nadi Santoso mengatakan, untuk melakukan optimalisasi pajak, Pemprov Jateng akan melakukan pemungutan pajak Kategori Pajak Alat Berat (PAB). Kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Demikian diungkapkan Nadi Santoso kepada wartawan di Semarang, Senin (21/10). Bapenda Jateng sudah melakukan sosialisasi kebijakan baru tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk saat sosialisasi PAB di Ruang Rapat Bapenda Jateng Kamis (17/10).

Menurut Nadi Santoso, pungutan PAB terhitung pajak baru. Dengan sosialisasi tersebut, ia berharap wajib pajak atau mereka yang memiliki alat berat atau menyewakan alat berat mengerti akan peraturan yang melandasi pajak itu. Selain peraturan, pihaknya juga sudah menyiapkan aplikasi khusus guna pelaksanaan

PAB di Jateng. Ia memastikan, mulai Senin (21/10) petugas di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) di 37 titik layanan sudah siap melayani wajib pajak atau WP.

Nadi mengatakan semua perangkat sudah disiapkan. Diharapkan mulai Senin (21/10) sudah bisa melayani. Saat sosialisasi juga dihadiri Pejabat Fungsional Analisis dan Daerah Ahli Muda Kemenkeu RI Sukma Wahyudin, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II Direktorat Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Azwirman dan Kasatgas 3.1 Direktorat Koordinasi dan



KR-Budiono

Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso, saat sosialisasi PAB di ruang kerjanya.

Supervisi Wilayah III KPK RI Maruli Tua.

PAB sudah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid tersebut ditindaklanjuti dengan PP No 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara lokal, Pemprov Jateng merespons dengan menerbitkan Perda No 12 tahun 2023. Selain itu ada Pergub

Jateng Nomor 64 tahun 2023 dan Peraturan Kepala Bapenda Nomor 6 tahun 2024, terkait teknis pemungutan PAB. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023, tarif PAB ditetapkan 0,2 persen dari nilai jual alat berat.

"Besaran pajak untuk Wajib Pajak belum bisa diberikan. Pemilik alat berat harus daftar dulu baru bisa ditetapkan besaran nilai pajaknya, tidak bisa secara langsung. Silakan nanti konsultasi dulu ke UPPD

terdekat," ujarnya.

Pemilik dan penyewa alat berat asal Grobogan Yohanes, berharap besaran pungutan pajak tersebut dilakukan detail dan komprehensif. Ia menyebut, dalam dunia alat berat sangat banyak variabel yang memengaruhi harga. Seperti beli baru atau bekas, spesifikasinya, fraasanya, hingga buatan negara mana, itu bisa mempengaruhi nilai jual. Juga faktor depresiasi atau penyusutan harga unit.

Meski demikian Yohanes mengaku tidak keberatan terkait pungutan tersebut. Yohanes berharap upaya itu akan memaksimalkan pendapatan daerah bagi Jateng. Dengan penambahan sektor pajak, secara makro akan bertambah PAD, juga distribusinya bagi program kemasyarakatan yang dicanangkan Pemprov Jateng dan multiplier efek yang dirasa warga akan semakin baik. (Bdi)-d

Tunaryo Pimpin DPRD Purworejo Periode 2024-2029



KR-Istimewa

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Purworejo dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (15/10/2024).

PURWOREJO (KR) - DPRD Kabupaten Purworejo Periode 2024-2029 dipimpin Tunaryo SSos sebagai Ketua, Wakil Ketua I (Rochman SSos) dan Wakil Ketua II (Frans Suharmaji SE MM). Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Purworejo dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (15/10).

Pjs Bupati Purworejo Endi Faiz Efendi SPI MA sebelumnya menerima berita acara usulan pimpinan DPRD definitif dari Ketua DPRD sementara Rochman SSos. "Selamat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo yang baru saja mengucapkan Sumpah/Janji," ucap Endi. Endi mengatakan, dirinya yakin dan percaya dengan kapasitas dan kapabilitas para pimpinan DPRD, mereka akan mampu menjalankan amanah yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat menjaga dan menjagukannya sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perun-

dang-undangan.

"Setelah adanya pimpinan yang definitif, lembaga DPRD Kabupaten Purworejo akan semakin solid dalam menjalankan tiga fungsi utamanya yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan," katanya.

Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi serta kerja kolektif legislatif dan eksekutif (kepala daerah) akan mengarah ke semua hal yang positif dalam memberikan respons cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan rakyat di Kabupaten Purworejo.

"Kerjasama yang terbanjir yang efektif di tingkat regional, juga akan mendukung suksesnya agenda prioritas nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Endi mengungkapkan, pesta demokrasi merupakan momentum tepat untuk menyinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. "Pilkada Serentak 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pe-

nyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.

Ketua DPRD terlantik, Tunaryo SSos dalam sambutan perdananya menyen-

butkan, jabatan Ketua DPRD merupakan kehormatan yang besar sekaligus tanggung jawab yang sangat berat. Selanjutnya, sebagai Ketua DPRD ia berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi masyarakat. "Tantangan

ke depan tentunya tidak mudah, namun dengan kerja sama dan sinergitas seluruh elemen kami yakin apa yang menjadi tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat dan membangun Kabupaten Purworejo," tandasnya. (*-5)-d



Minim Anggaran, Pelayanan Panti Sosial Belum Optimal

KETUA Komisi E DPRD Jateng Messy Widiyastuti mengatakan, keberadaan panti sosial harus mendapatkan perhatian serius. Kebijakan anggaran dari pemerintah dinilai belum berpihak secara keseluruhan kepada pelayanan panti. Masih ada ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran. Kondisi itulah yang menjadikan pelayanan panti sosial tidak bisa optimal.

Messy Widiyastuti mengatakan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke Panti Pelayanan Sosial Anak ePamardi Utomo' Boyolali dan Panti Pelayanan Sosial eWanodyatama' Surakarta Selasa-Rabu (16/17/10). Dalam berdiskusi terungkap kendala optimalisasi dari pelayanan kedua panti tersebut adalah soal keterbatasan anggaran. Diakui selama ini masalah pengelolaan panti terbilang dilematis. Untuk itu, pemerintah harus hadir sehingga pelayanan panti dapat optimal di tengah keterbatasan anggaran. Seharusnya secara fisik, evaluasi sarana dan prasarana dilakukan setiap tahun. Kita utamakan pelayanan dari negara untuk masyarakat atau penerima bantuan, karena kebijakan tersebut merupakan



KR-Budiono

Messy Widiyastuti

jaring pengaman sosial terbawah, yang tidak terkomodasi. Harapannya panti sosial, apalagi yang milik pemerintah pelayanan harus bagus.

Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak 'Pamardi Utomo' Boyolali Shodik Wibowo mengaku selama ini pihaknya berkegiatan sesuai dengan program rutin yang dijalankan. Program dilaksanakan

untuk anak binaan seperti bimbingan seni musik, bimbingan disiplin dan fisik, bimbingan baca tulis Alquran, bimbingan keagamaan dan bimbingan keterampilan sablon dengan jumlah tidak lebih dari 80 orang.

Minimnya anggaran untuk pengelolaan panti tidak begitu dirasakan oleh panti milik Pemprov Jawa Tengah. Dengan adanya kekurangan anggaran tersebut, pengelola panti mencoba memaksimalkan apa yang ada dan membimbing anak-anak dengan sepenuh hati, sehingga menjadikan anak-anak bisa hidup mandiri setelah keluar dari panti. (*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Jateng Messy Widiyastuti kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)